

PEMAHAMAN DAN PERSEPSI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA TERHADAP PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Ika Listyawati ¹⁾
Bambang Widarno ²⁾
Fadjar Harimurti ³⁾

1, 2, 3) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta
e-mail: ¹⁾ ika_listyawati@yahoo.co.id
²⁾ bwidarno@yahoo.com
³⁾ fadjarharimurti@gmail.com

ABSTRACT

This study aimed to analyze the level of understanding of Surakarta City Council Members To The Financial Statements and the Public Sector Perceptions Surakarta City Council Member of the Financial Statements on education. This study is a survey of the population of Surakarta City Council Member 2014 - 2019 Forces with sampling techniques census method used in this study, namely all the population sampled in this study, so that the sample in this study amounted to 45 samples can be processed but which amounted to 41 samples. The technique of collecting data using questionnaires. The method of analysis used descriptive analysis, to collect, process, and interpret data. The results showed that Assembly Members Surakarta not understand the financial statements of public sector and the perception of Surakarta City Council Member to the presentation of financial statements of public sector agreed to presentation of financial statements conducted by SKPD Surakarta.

Keywords: *understanding financial statements, public sector, financial reports.*

PENDAHULUAN

Belakangan ini banyak terjadi perubahan yang terjadi pada Negara Indonesia yang bersifat signifikan dan fundamental dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintah, yaitu di mana sejak diberlakukannya otonomi daerah secara efektif. Hal ini tertuang sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No. 22/1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Selain itu, implementasi otonomi daerah ini mendapat sambutan dengan adanya pengesahan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah serta UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Wayan, Ni kadek dan Nyoman, 2014).

SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia, sesuai dengan PP No. 24 pada bagian Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan (2005: 2), SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Namun Roesyanto (2007: 3) menyatakan bahwa rata-rata pemerintah daerah belum dapat menyusun laporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu PP No. 24 Tahun 2005 yang sekarang sudah berganti menjadi PP No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sehubungan dengan penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai dengan SAP, maka perlu diperhatikan faktor pemahaman terhadap SAP agar hasil dari laporan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan (Wayan, Ni kadek dan Nyoman, 2014).

Perlu disadari bahwa jika dalam kenyataannya anggota DPR/DPRD menunjukkan adanya tingkat kualitas dan kemampuan yang berkebalikan dengan kualifikasi ideal sebagai

anggota legislatif, maka kemungkinan yang terjadi adalah adanya dominasi oleh pemerintah daerah karena ketidakmampuan memahami dan memainkan perannya sebagaimana mestinya (Murni, 2004). Jika hal ini terjadi, maka anggota DPR/DPRD tidak dapat lagi melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah secara efektif (Titik, 2013).

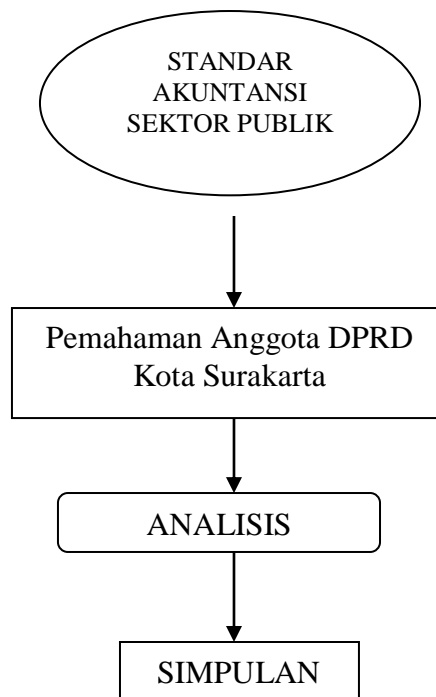
Menurut PP 71 Tahun 2010 pelaporan keuangan menyajikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran serta indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD. Kedua indikasi tersebut erat kaitannya dengan fungsi serta tugas dan wewenang anggota DPRD. Anggota DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan yang optimal atas laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah jika anggota DPRD meningkatkan pemahaman mereka mengenai informasi keuangan yang disajikan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku (Harun, 2009 dalam Titik, 2013).

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman atau pengetahuan anggota DPRD tentang keuangan perlu sekali, sedangkan keuangan erat hubungannya dengan sistematika Laporan Keuangan agar dapat mengetahui atau memahami pelaksanaan anggaran yang telah dibuat. Maka sudah sepatutnya Anggota DPRD memahami Penyajian Laporan Keuangan agar dapat melaksanakan salah satu fungsi pokoknya sebagai pengawas anggaran dalam satu daerah yang dilaksanakan atau dipimpin oleh kepala daerah (Legislatif). Oleh karena itu peneliti terinspirasi untuk melihat apakah DPRD Kota Surakarta melaksanakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman DPRD Kota Surakarta terhadap penyajian laporan keuangan sektor publik dan kualitas laporan keuangan SKPD.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1: Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan survei terhadap Anggota DPRD Kota Surakarta Angkatan 2015 - 2019 dengan teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan metode sensus, yaitu semua populasi dijadikan sampel dalam penelitian ini, sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 45 sampel tetapi yang dapat diolah berjumlah 41 sampel. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner.

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui jawaban kuesioner. Teknik pengumpulan data menggunakan skala Likert lima poin yaitu: mulai dari Sangat Setuju (SS = 5); Setuju (S = 4); Netral (N = 3); Tidak Setuju (TS = 2) dan Sangat Tidak Setuju (STS = 1) dan Tidak Memahami (TM = 1), Hanya sedikit Memahami (HSM = 2), Sebagian Memahami (SM = 3), Memahami (M = 4), Sangat Memahami Sekali (SMS = 5).

Teknik analisis data menggunakan:

1. Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian ini. Alat analisis yang digunakan adalah rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum dan minimum. Statistik deskriptif menyajikan ukuran-ukuran numerik yang sangat penting bagi data sampel (Indah, 2011).

2. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut (Nafiantun Rohmad, 2002: 31) dalam (Fuadi wahyu, 2008: 15):

1) Menyusun kuesioner yang mencakup tentang penyajian laporan keuangan. Kuesioner yang telah disusun tersebut kepada Anggota DPRD Kota Surakarta pada saat penelitian dilakukan untuk diisi. Alternatif jawaban yang disediakan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Tidak Memahami (TM) diberikan nilai 1
- b) Hanya sedikit Memahami (HSM) diberikan nilai 2
- c) Sebagian Memahami (SM) diberikan nilai 3
- d) Memahami (M) diberikan nilai 4
- e) Sangat Memahami Sekali (SMS) diberikan nilai 5

Atau

- a) Sangat Tidak Setuju (STS) diberikan nilai 1
- b) Tidak Setuju (TS) diberikan nilai 2
- c) Ragu-ragu (RR) diberikan nilai 3
- d) Setuju (S) diberikan nilai 4
- e) Sangat Setuju (SS) diberikan nilai 5

2) Kuesioner yang disebarkan ini kemudian ditabulasikan, dari jawaban dalam kuesioner yang telah diberikan bobot skor seperti poin 1 di atas.

- a) Menghitung jawaban responden penelitian dengan menggunakan daftar indeks. Perhitungan atas jawaban responden tersebut nantinya dapat diwujudkan dalam bentuk tabel sebagai berikut (Nafiantun Rohmad, 2002: 31) dalam (Fuadi wahyu, 2008: 15).

HASIL PENELITIAN

1. Karakteristik Responden

Di bawah ini akan peneliti tampilkan karakteristik responden penelitian.

Tabel 1: Gambaran Umum Karakteristik Responden

Karakteristik	Keterangan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-Laki	32	78,05
	Perempuan	9	21,95
	Jumlah	51	100
Usia	30 - 40	11	26,83
	41 - 50	14	34,15
	≥ 51 tahun	16	39,02
	Jumlah	41	100
Pendidikan	SMA/SMK	9	21,95
	D3	1	2,44
	S1 ke atas	31	75,61
	Jumlah	41	100

Sumber: Data Primer yang diolah, 2016

2. Analisis Data Kualitatif

Analisis Data ini dilakukan untuk mengetahui pemahaman Anggota DPRD kota Surakarta tentang Penyajian Laporan Keuangan Sektor Publik. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

- a. Menyusun kuesioner yang mencakup tentang penyajian laporan keuangan. Kuesioner yang telah disusun tersebut disebarakan kepada Anggota DPRD Kota Surakarta pada saat penelitian dilakukan untuk diisi. Alternatif jawaban yang disediakan dapat dijabarkan sebagai berikut:
 - a) Tidak Memahami (TM) diberikan nilai 1
 - b) Hanya sedikit Memahami (HSM) diberikan nilai 2
 - c) Sebagian Memahami (SM) diberikan nilai 3
 - d) Memahami (M) diberikan nilai 4
 - e) Sangat Memahami Sekali (SMS) diberikan nilai 5Hasil dari kuesioner yang disebarakan kepada responden penelitian tersebut dapat ditabulasikan yang dapat dilihat dalam lampiran.
- b. Menghitung jawaban responden penelitian dengan menggunakan daftar indeks. Perhitungan atas jawaban responden tersebut nantinya dapat diwujudkan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 2: Tabel Hasil Perhitungan Jawaban Responden Penelitian

Pertanyaan	Jawaban STS/TM(1) a ₁	Jawaban TS/HSM(2) a ₂	Jawaban RR/ SM(3) a ₃	jawaban S/M (4) a ₄	Jawaban SS /SMS (5) a ₅	Jumlah (Σ)
1	19	18	18	28	0	83
2	14	24	21	32	0	91
3	12	26	21	36	0	95
4	7	36	21	36	0	100
5	12	24	30	28	0	94
6	13	18	30	36	0	97
7	14	14	30	40	0	98
8	16	18	30	24	0	88
9	12	20	30	32	5	99
10	11	24	24	36	5	100
11	1	2	15	44	115	177
12	0	6	15	52	100	173
13	0	4	12	72	85	173
14	0	4	21	56	90	171
15	2	8	9	72	70	161
16	1	6	24	92	30	153
17	1	8	12	72	70	163
18	1	4	24	68	65	162
19	3	4	24	52	75	158
20	3	2	18	60	80	163
Jumlah (Σ)	142	270	429	968	790	2559

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

c. Berdasarkan pada skor yang telah diperoleh, selanjutnya digolongkan ke dalam kategori: Tidak memahami, Hanya sedikit memahami, Sangat memahami, Memahami, Sangat memahami sekali, dengan cara menentukan indeks minimum dan maksimumnya.

1) Nilai indeks minimum diperoleh dengan anggapan bahwa seluruh jawaban adalah Sangat tidak setuju atau Tidak memahami (1). Dengan demikian nilai indeks minimumnya dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Nilai Indeks Minimum} = 1 \times 20 \times n = 20n.$$

Di mana:

1 = skor jawaban minimum

20 = skor total pertanyaan

n = jumlah responden

20n = nilai indeks minimum

Berdasarkan rumus tersebut, maka dapat dihitung besarnya nilai indeks minimum sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Nilai Minimum} &= 1 \times 20 \times 41 \\ &= 820 \end{aligned}$$

2) Nilai indeks maksimum diperoleh dengan anggapan bahwa seluruh jawaban adalah Sangat Setuju atau Sangat Memahami Sekali (5), maka dapat diketahui nilai indeks maksimumnya dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Indeks Maksimum} = 5 \times 20 \times n = 100n.$$

Di mana:

5 = skor jawaban maksimal

20 = jumlah total pertanyaan

n = jumlah responden

Berdasarkan pada rumus tersebut, maka dapat dihitung besarnya nilai indeks maksimum sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Nilai Indeks maksimum} &= 5 \times 20 \times 41 \\ &= 4100\end{aligned}$$

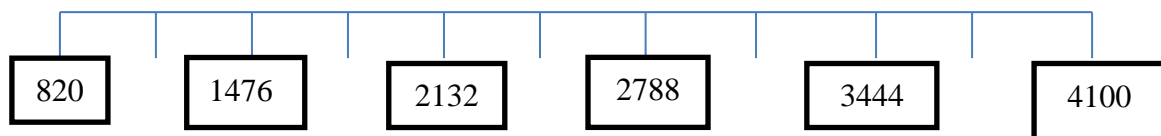
Berdasarkan pada nilai indeks maksimum dan minimum tersebut, maka akan diperoleh nilai interval di antara keduanya, yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Interval} &= \text{Nilai indeks maksimum} - \text{Nilai indeks minimum} \\ &= 4100 - 820 \\ &= 3280\end{aligned}$$

Dalam kuesioner yang telah disusun terdapat lima alternatif jawaban, maka untuk mencari jarak intervalnya dapat dilakukan dengan cara membagi antara nilai interval dengan jumlah alternatif jawaban, yaitu:

$$\text{Jarak interval} = \frac{3280}{5} = 656$$

Dengan demikian hasil pengukuran tersebut dapat diwujudkan dalam garis bilangan sebagai berikut:



Gambar 2: Skala Indeks Pengukuran

Keterangan:

- 1) $820 \leq \text{Skor jawaban} < 1476$ = Tidak Memahami
- 2) $1477 \leq \text{Skor jawaban} < 2132$ = Hanya Sedikit Memahami
- 3) $2133 \leq \text{Skor jawaban} < 2788$ = Sebagian Memahami
- 4) $2789 \leq \text{Skor jawaban} < 3444$ = Memahami
- 5) $3445 \leq \text{Skor jawaban} < 4100$ = Sangat Memahami Sekali

Untuk selanjutnya dalam penelitian ini dilakukan perhitungan terhadap jawaban responden yang dapat disajikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Jumlah jawaban responden} &= \sum a_1 + 2a_2 + 3a_3 + 4a_4 + 5a_5 \\ &= 142 + 270 + 429 + 968 + 790 \\ &= 2599\end{aligned}$$

Jumlah jawaban responden yang berjumlah 2599 tersebut di atas, maka diinterpretasikan terhadap kategori skor yang telah ditentukan, yaitu berada pada kategori $2133 \leq \text{Skor jawaban} < 2788$ (Sebagian Memahami dan sebagian tidak memahami). Hasil perhitungan yang diperoleh jumlah jawaban dari responden penelitian, yaitu 2599 ini menunjukkan bahwa Anggota DPRD Kota Surakarta sebagian memahami dan sebagian tidak memahami penyajian laporan keuangan sektor publik.

3. Hasil Analisis Data Deskriptif

Tabel 3: Pemahaman Anggota DPRD Kota Surakarta Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Sektor Publik

No	PERTANYAAN	TM	HSM	SM	M	SMS	Jumlah
1	Bapak/Ibu memahami mengenai Neraca (PSAP 01)	19	9	6	7	0	41
2	Bapak/Ibu memahami mengenai Laporan Realisasi Anggaran (PSAP 02)	14	12	7	8	0	41
3	Bapak/Ibu memahami mengenai Laporan Arus Kas (PSAP 03)	12	13	7	9	0	41
4	Bapak/Ibu memahami mengenai Catatan atas Laporan Keuangan (PSAP 04)	7	18	7	9	0	41
5	Bapak/Ibu memahami mengenai Persediaan (PSAP 05)	12	12	10	7	0	41
6	Bapak/Ibu memahami mengenai Investasi (PSAP 06)	13	9	10	9	0	41
7	Bapak/Ibu memahami mengenai Aset Tetap (PSAP 07)	14	7	10	10	0	41
8	Bapak/Ibu memahami mengenai Kontruksi Dalam Pengerjaan (PSAP 08)	16	9	10	6	0	41
9	Bapak/Ibu memahami mengenai Kewajiban (PSAP 09)	12	10	10	8	1	41
10	Bapak/Ibu memahami mengenai Koreksi Kesalahan,Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa (PSAP 10)	11	12	8	9	1	41
Jumlah		130	111	85	82	2	410
Persentase (%)		31,71	27,07	20,73	20	0,49	100

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman anggota DPRD Kota Surakarta terhadap penyajian laporan keuangan terdiri dari 3 kategori yaitu TM (tidak memahami) 58,78%, ragu-ragu 20,73%, dan memahami 20,49%. Hasil perhitungan yang diperoleh jumlah jawaban dari responden penelitian, yaitu paling besar 58,78% ini menunjukkan bahwa Anggota DPRD Kota Surakarta Tidak memahami penyajian laporan keuangan sektor publik. Anggota DPRD Kota Surakarta menunjukkan adanya tingkat kualitas dan kemampuan yang berkebalikan dengan kualifikasi ideal sebagai anggota legislatif, maka kemungkinan yang terjadi adalah adanya dominasi oleh pemerintah daerah karena ketidakmampuan memahami dan memainkan perannya sebagaimana mestinya. Anggota DPRD Kota Surakarta seharusnya memahami penyajian laporan sektor publik. Anggota DPRD Kota Surakarta untuk meningkatkan pengetahuannya untuk menunjang profesinya sebagai seorang Anggota DPRD. Salah satu kemampuan yang harus ditingkatkan oleh seorang Anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya adalah pengetahuan tentang penyajian laporan keuangan sektor publik.

Tabel 4: Persepsi Anggota DPRD Kota Surakarta terhadap Penyajian Laporan Keuangan Sektor Publik

No	PERTANYAAN	STS	TS	RR	S	SS	Jml
1	SKPD mampu menyusun laporan keuangan secara lengkap (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan).	1	1	5	11	23	41
2	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan menggambarkan dengan jujur transaksi yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan.	0	3	5	13	20	41
3	Informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya	0	2	4	18	17	41
4	Laporan keuangan yang disusun oleh SKPD telah dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya.	0	2	7	14	18	41
5	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan SKPD bebas dari kesalahan yang bersifat material.	2	4	3	18	14	41
6	Informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan SKPD memenuhi kebutuhan para pengguna laporan keuangan.	1	3	8	23	6	41
7	Laporan keuangan daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa.	1	4	4	18	14	41
8	Memberikan kemudahan kepada para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah.	1	2	8	17	13	41
9	Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet (website)	3	2	8	13	15	41
10	Pendapatan daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	3	1	6	15	16	41
Jumlah		12	24	58	160	156	410
Persentase (%)		2,93	5,85	14,15	39,02	38,05	100

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi Anggota DPRD Kota Surakarta terhadap penyajian laporan keuangan sektor publik terdiri dari 3 kategori yaitu TS (tidak setuju) 8,78%, RR (ragu-ragu) 14,15%, dan SS (sangat setuju) 77,07%. Hasil perhitungan yang diperoleh jumlah jawaban dari responden penelitian, yaitu paling besar 77,07% ini menunjukkan bahwa Anggota DPRD Kota Surakarta Setuju terhadap pengelolaan penyajian laporan keuangan yang di lakukan SKPD.

KESIMPULAN

Hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa tingkat pemahaman anggota DPRD Kota Surakarta terhadap penyajian laporan keuangan menunjukkan bahwa Anggota DPRD Kota Surakarta Tidak memahami penyajian laporan keuangan sektor publik dan Persepsi Anggota DPRD Kota Surakarta terhadap penyajian laporan keuangan sektor publik menunjukkan bahwa Anggota DPRD Kota Surakarta Setuju terhadap pengelolaan penyajian laporan keuangan yang di lakukan oleh SKPD Kota Surakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Duma, 2013, “Pengaruh Latar Belakang Pribadi Pemeriksa terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan dan Pengalaman Pemeriksa Sebagai Variabel Moderating Pada Inspektorat Kabupaten Sebagai Kuesoner”, *Universitas Sumatera Utara* Hal: 1 - 11.
- Dian dan Nursiam, 2015, “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Akseibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali”, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Univesitas Muhammadiyah Surakarta*, ISSN 2460 - 0784 Hal: 1 - 12.
- Fityan Izza, 2012, “Studi Fenomenologi: Pemahaman Atas Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Daerah”, *Jurnal*, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) Hal: 2 - 18.
- Titik Setyaningsih, 2013, “Studi Eksplorasi Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD terhadap Standar Akuntansi Berbasis Akreal (Kasus di Pemerintah Kota Surakarta)”, *Jurnal. Universitas Sebelas Maret Surakarta* Hal: 1 - 24.
- Wayan, Ni Kadek dan Nyoman, 2014, “Pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah dan latar belakang pendidikan terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah(studi pada satuan kerja perangkat daerah di kabupaten Klungkung)”, *Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol. 2. No 1 Hal: 1 - 10.
- Fuadi Wahyu, 2008, “Persepsi Pemahaman Auditor terhadap Fraud Auditing dalam Mencegah dan Mendeteksi Fraud Illegal Act Pada Perusahaan yang Menggunakan Jasa Kap di Surakarta”, Skripsi, Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Slamet Riyadi, Tidak Dipublikasikan Hal: 1 - 80.
- jurnal.umrah.ac.id/.../2014/.../Masyitah-As-Sahara-09. diakses tanggal 20 Juli 2016.